

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam Era globalisasi seperti saat ini, pola interaksi hubungan internasional berupaya menjadikan dunia lebih terintegrasi antar elemen yang satu dengan elemen lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran pola interaksi internasional yang semula bersifat *high politics*, dimana aktor yang terlibat hanya negara dan pembahasannya pun terpacu pada isu keamanan dan pertahanan dari suatu negara. Kini bergeser menjadi *low politics*, dimana aktor yang terlibat tidak hanya *state* melainkan aktor sub nasional seperti pemerintah daerah dan isu yang dibahas pun berkembang mulai dari isu ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, hingga pada isu lingkungan. Keterlibatan aktor sub nasional dalam interaksi internasional merupakan wujud dari berlangsungnya praktik diplomasi. Diplomasi dapat didefinisikan sebagai sebuah cara berkomunikasi yang dilakukan antar pihak termasuk pada komunikasi yang dijalin oleh wakil-wakil dari setiap negara yang sudah diakui (Suryokusumo, 2016).

Diplomasi memiliki beberapa bentuk yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai isu dan fenomena dalam hubungan antar negara yang terjadi. Dalam pelaksanaannya diplomasi dapat diwujudkan dalam sebuah skema kerja sama internasional. Kerja sama internasional dapat diartikan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama dan saling melakukan pendekatan guna mencari suatu pemecahan dari sebuah masalah yang dihadapi melalui pendekatan dari masing-masing negara (Holsti, 1988).

Kerja sama internasional yang dilakukan oleh aktor sub nasional dalam ilmu hubungan internasional disebut dengan istilah paradiplomasi. Istilah paradiplomasi berasal dari kata *parallel diplomacy* yang dikembangkan menjadi *paradiplomacy*. Paradiplomasi bermakna sebagai sebuah cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan luar negerinya. Paradiplomasi menjadi sebuah titik perubahan dalam hubungan internasional dengan melibatkan

pemerintah daerah guna mencapai kepentingan nasional suatu negara. Hal ini mengindikasikan bahwa pemikiran mendasar mengenai kedaulatan Negara sudah berubah secara fundamental (Mukti, 2013).

Dalam pelaksanaan diplomasi antara pemerintah daerah di Indonesia dengan pemerintah daerah di luar negeri, maka dalam penerapannya harus sesuai dan berlandaskan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 1 (1) UU Nomor 37 Tahun 1999 yang berbunyi :

Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara. (Undang-Undang No 37 Tahun 1999)

Sebagai salah satu wujud dari implementasi kerja sama internasional dapat berupa *Sister City*. *Sister City* atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kota kembar merupakan kerja sama yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang di antara dua kota berbeda negara. *Sister City* diartikan sebagai suatu konsep kerjasama antara dua kota yang secara geografis dan politik hampir serupa yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar budaya dan individu. Hubungan *sister city* dibentuk berdasarkan persetujuan yang bersifat resmi diantara dua pemerintah lokal dari dua negara yang berbeda (Sinaga, 2010).

Sister City di Indonesia memiliki landasan awal yakni surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 193 tahun 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) yang pada dasarnya memiliki fokus pada pembentukan kerjasama di bidang ekonomi, namun seiring dengan saling terintegrasinya kota-kota di Indonesia maka menjadikan sektor-sektor lain menjadi penting, seperti halnya sektor pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan lingkungan dalam pengembangan dan peningkatan infrastruktur serta tata kota (Jatmika, 2001).

Sister City di Indonesia telah berkembang sejak tahun 1960-an. Kerja sama yang terjalin pun dilatar belakangi oleh beberapa isu, seperti isu ekonomi, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, hingga pada isu lingkungan (Mukti, 2013). Sudah banyak kota di Indonesia yang menjalin kerja sama dengan kota di negara lain, misalnya kerja sama yang dijalin antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig yang merupakan *sister city* tertua di Indonesia yang berfokus pada kebudayaan dan pendidikan. Selain itu ada juga kerja sama *sister city* yang terjalin antara Kota Bogor dengan Kota St.Louis, Daejeon, Salak Tinggi, Utrecht dan beberapa kota di negara lainnya (Pemerintah Kota Bogor, 2016). Kota Jakarta sebagai kota administratif tingkat I pun sudah menjalin kerja sama *sister city* dengan 21 kota di negara lainnya, diantaranya dengan Kota Pyongyang, Budapest, Beijing, Berlin, Moskow, Kyiv, Istanbul, Maputo, Jerusalem, Arkansas, New South Wales, Paris, Bangkok, Los Angles, Tokyo, Casablanca, Islamabad, Seoul, Rotterdam, Jeddah, dan Hanoi. Adanya kesamaan secara administratif diantara kota-kota tersebut dengan Kota Jakarta menjadi salah satu alasan terwujudnya kerja sama *sister city* (Pemprov DKI Jakarta, 2018).

Sejak tahun 2004 Kota Jakarta menjalin kerjasama *sister city* dengan Kota Hanoi. Kerjasama disahkan melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh Gubernur Sutiyoso dan Dr. Nguyen Quoc Trieu pada 23 November. Kerjasama yang terjalin antara kedua kota berfokus pada sektor ekonomi, pendidikan, budaya, dan lingkungan. Seiring perkembangan waktu, fokus kerja sama kedua kota pun semakin meluas (Pemprov DKI Jakarta, 2007). Hanoi memiliki beberapa persamaan dengan Jakarta, dimana keduanya sebagai kota yang memiliki lahan terbatas dan sebagai pusat pemerintahan yang menyimpan berbagai bangunan bersejarah. Namun, keterbatasan lahan tak menghambat kreativitas pemerintah Hanoi dalam melakukan penataan kota. Pemerintah Hanoi gencar melakukan revitalisasi dan penataan bangunan terlantar disekitar kawasan wisata bersejarah. Salah satunya pemerintah Hanoi mempercantik kawasan wisata bersejarah Old Quarter dengan membangun sebuah taman hijau dan membuat sebuah zona khusus bagi para pedagang yang terletak di jalan Hang Dao, Hang Duong, Hang Bac dan beberapa jalan lainnya, hal ini dilakukan agar para wisatawan yang akan

berkunjung ke Old Quarter atau sekitar danau Hoan Kiem tak terganggu hiruk pikuk para pedagang (Phuong, 2017).

Seperti yang diketahui Kota Jakarta memiliki Kota Tua yang menyimpan berbagai bangunan sejarah dan sebagai salah tujuan wisata seperti layaknya Old Quarter di Hanoi. Kota Tua Jakarta menyimpan sejumlah museum, diantaranya Museum Fatahillah, Museum Wayang, Museum Seni dan Keramik, Museum Bank Mandiri, dan Museum Bank Indonesia. Kondisi wisata Kota Tua Jakarta hanya terpusat disekitar Museum Fatahillah sedangkan cakupan Kota Tua Jakarta sangatlah luas, yakni sekitar 86 hektar (Firdaus, Purwantiasning, & Prayogi, 2018). Luasnya Kota Tua Jakarta membuat tak sedikit wisatawan yang memilih menggunakan kendaraan pribadi, hal ini menyebabkan kemacetan disekitar kawasan Kota Tua dan kondisi pun semakin diperparah dengan banyaknya pedagang kaki lima disekitar kawasan Kota Tua (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemrov DKI Jakarta, 2017).

Melihat keberhasilan Hanoi dalam tata kota menarik perhatian pemerintah Jakarta untuk bekerja sama dalam perencanaan kota. Pada tahun 2018 pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah Kota Hanoi memiliki fokus kerja sama pada pengorganisasian proses perencanaan renovasi kawasan kota tua dan bangunan terlantar, revitalisasi kawasan kota tua, kota hijau, dan bangunan hijau, dan pembangunan kembali jalan perkotaan. Pemerintah Kota Jakarta Setelah disahkannya revitalisasi kawasan kota tua tahap I, pemerintah DKI Jakarta berharap agar kedepannya kawasan Kota Tua akan menjadi salah satu destinasi wisata utama yang akan dikunjungi oleh para wisatawan. Melalui kerja sama dengan Kota Hanoi, Pemerintah juga berharap revitalisasi ini akan menjadikan kawasan Kota Tua menjadi lebih asri dan ramah bagi para pegiat ekonomi. Revitalisasi kawasan kota tua melalui beberapa program yang menerapkan manajemen kota berdasarkan pada *applicability*, *practicality*, *effectiveness*, dan *non-duplication* (KM Bappeda DKI Jakarta).

Namun program yang dicanangkan oleh kedua belah pihak tak berjalan sesuai dengan harapannya. Pada proses revitalisasi ini Pemerintah DKI Jakarta mengalami beberapa kendala terkait dengan kurangnya lahan, perizinan, dan

infrastruktur yang didasari pada hak kepemilikan bangunan-bangunan di sekitar Kawasan Kota Tua Jakarta yang merupakan kepemilikan pihak swasta dan/atau perorangan. Sehingga target dari kerja sama *sister city* DKI Jakarta dan Kota Hanoi belum terealisasi dengan baik. Melihat kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Hanoi, membuat penulis tertarik untuk menulis karya tulis mengenai Kerja Sama *Sister City* antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Hanoi dalam Revitalisasi Kawasan Kota Tua periode 2017-2019.

I.2 Rumusan Masalah

Kerja sama *sister city* antara Kota Jakarta dan Kota Hanoi telah menunjukkan perubahan tatanan dalam hubungan internasional yang melibatkan aktor sub nasional dalam pelaksanaannya. Hal ini tentu berpengaruh kepada kedua kota, khususnya pada bidang lingkungan. Dari latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, untuk mengetahui bagaimana proses berlangsungnya kerjasama *sister city* antara Kota Jakarta dengan Kota Hanoi, penulis membuat rumusan masalah yaitu :

Bagaimana upaya kerja sama antara Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Kota Hanoi dalam menyikapi kendala revitalisasi Kawasan Kota Tua Jakarta Periode 2017-2019?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan menganalisa kerja sama antara Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Pemerintah Kota Hanoi dalam menyikapi berbagai kendala yang terjadi terkait dengan revitalisasi Kawasan Kota Tua Jakarta periode 2017-2019.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat dan kontribusi :

- a. **Secara akademis**, penelitian ini dapat memberikan informasi dan hasil temuan terkait dengan kerja sama *sister city* dalam bidang tata kelola kawasan wisata bersejarah.
- b. **Secara Praktis**, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kerja sama *sister city* Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Hanoi dalam revitalisasi Kawasan Kota Tua periode 2017-2019.

I.5 Rencana Pembahasan Skripsi

Untuk memahami alur pemikiran tulisan ini, maka tulisan ini dibagi dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub bab. Sistematika penulisan adalah membagi hasil penelitian ini ke dalam 4 bab, yaitu :

a. BAB I LATAR BELAKANG

Bab pendahuluan ini akan menjabarkan permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan yang akan digunakan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai kerangka teori Diplomasi hingga Paradiplomasi, konsep kerjasama internasional, dan referensi atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik permasalahan yaitu kajian mengenai kerjasama *sister city* antar kedua Pemerintah Kota di Indonesia dan luar Indonesia.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab 3 ini, akan membahas mengenai metode penelitian apa yang penulis gunakan, sumber data yang penulis ambil, bagaimana teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan waktu serta lokasi pengumpulan data.

d. BAB IV DINAMIKA KERJASAMA SISTER CITY ANTARA KOTA JAKARTA DAN KOTA HANOI

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum kawasan Kota Tua Jakarta dan awal mula kerja sama *sister city* antara Kota Jakarta dan Kota Hanoi.

e. **BAB V UPAYA KERJASAMA REVITALISASI KAWASAN KOTA TUA JAKARTA DALAM SKEMA KERJA SAMA *SISTER CITY* DENGAN KOTA HANOI**

Pada bab ini penulis membahas terkait dengan terjadinya kerja sama *sister city* antara DKI Jakarta dan Kota Hanoi dalam revitalisasi kawasan kota tua periode 2017-2019.

f. **BAB VI PENUTUP**

Bab penutup ini mengandung kesimpulan dari pokok permasalahan penelitian. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil analisis data yang diperoleh.